**ABSTRAK**

Kabupaten Manggarai Barat yang beribukota di Labuan Bajo merupakan salah satu daerah pariwisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu objek wisata yang menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi selain karena keindahan alamnya adalah adanya hewan purbakala yang dikenal dengan Komodo. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komdo menyebabkan naiknya jumlah PNPB tiap tahun. Pemerintah Daerah pun melakukan pengembangan objek wisata yang ada dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehinngga, penulis tertarik untuk mengambil judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA TAMAN NASIONAL KOMODO DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”.** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo, faktor pendukung dan faktor penghambat sekaligus upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.

Penelitian ini dikonsep berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam pengembangan pariwisata Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata seperti anggaran yang masih terbatas, kualitas dan kuantitas para pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat dan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang belum memadai, serta kurang adanya partisipasi dari masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran antara lain agar Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, penambahan jumlah pegawai yang berkualitas, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak di bidang kepariwisataan dan kegiatan sosialisasi mengenai sapta pesona dan sadar wisata.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pariwisata